

**KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI DI KABUPATEN
BLORA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK**



Diajukan oleh :
Sri Purwati
Nim: 22.c2.0077

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

**KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI DI KABUPATEN
BLORA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh :
Sri Purwati
Nim: 22.c2.0077

Kepada
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024

ABSTRAK

Remaja umumnya menghadapi permasalahan terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi yang disebabkan terbatasnya informasi dan advokasi. Hal ini diperkirakan menjadi penyebab angka kejadian perkawinan anak di Jawa Tengah melampaui rata-rata nasional yaitu mencapai 9,75%, dan Kabupaten Blora termasuk diantara kabupaten tertinggi dengan kasus perkawinan anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan kebijakan kesehatan reproduksi di Kabupaten Blora dalam upaya pencegahan perkawinan anak; 2) Bagaimana pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi di Kabupaten Blora dalam upaya pencegahan perkawinan anak; 3) Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi di Kabupaten Blora dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis* dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Tujuan penelitian adalah untuk mendiskriptifkan dan menganalisis tentang pengaturan, pelaksanaan dan faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi di Kabupaten Blora dalam upaya mencegah perkawinan anak. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap informan utama, informan pendukung dan responden. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian semua data tersebut dianalisis secara *deskriptif* dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan kebijakan kesehatan reproduksi di Kabupaten Blora dalam pencegahan perkawinan anak secara khusus belum ada, namun sudah ada peraturan terkait pendidikan kesehatan reproduksi dalam Perkada-Perkada Kabupaten Blora. Namun, substansi materi tentang kesehatan reproduksi pada anak dan remaja belum sesuai dengan peraturan perundangan; 2) Pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi di Kabupaten Blora dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui berbagai program dan kegiatan belum dilaksanakan secara optimal karena pelaksanaan program kegiatan saling tumpang tindih; 3) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi di Kabupaten Blora dalam upaya pencegahan perkawinan anak, yaitu belum ada kebijakan khusus tentang kesehatan reproduksi pada anak dan remaja dengan substansi materi kesehatan reproduksi yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, belum ada komitmen antar dinas terkait dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi pada anak dan remaja, belum tersedianya fasilitas pelayanan PKPR yang memadai baik di Puskesmas maupun di sekolah, dan belum tersedianya sumber daya manusia pelaksana kebijakan kesehatan reproduksi yang berkompeten.

Kata kunci : Kebijakan, Kesehatan Reproduksi, Perkawinan Anak.

ABSTRACT

Adolescents generally face problems related to sexuality and reproductive health caused by limited information and advocacy. This is thought to be the reason why the incidence of child marriage in Central Java exceeds the national average. Cases of child marriage in Central Java reached 9.75% and Blora Regency is among the districts/cities with the highest cases of child marriage. The formulation of the problem in this research is 1) How is the Reproductive Health Policy regulated in Blora Regency in an effort to prevent child marriage; 2) How is the reproductive health policy implemented in Blora Regency in an effort to prevent child marriage; 3) What factors are obstacles in implementing reproductive health policies in Blora Regency in efforts to prevent child marriage.

This research is a descriptive analytical research using a sociological juridical approach. The aim of the research is to describe and analyze the regulation, implementation and factors that become obstacles to the implementation of reproductive health policies in Blora Regency in an effort to prevent child marriage. Primary data collection was carried out by interviews with main informants, supporting informants and respondents. Secondary data was obtained through literature study, then all the data was analyzed descriptively and qualitatively.

The results of the research show that: 1) There are no specific reproductive health policy arrangements in Blora Regency for preventing child marriage, but there are already regulations to provide reproductive health education contained in the Blora Regency Regional Regulations. However, the substance of material regarding reproductive health in children and adolescents is not yet in accordance with statutory regulations; 2) Implementation of the Reproductive Health Policy in Blora Regency in an effort to prevent child marriage through various programs and activities has not been implemented optimally because the implementation of program activities overlaps; 3) Factors that become obstacles in the implementation of reproductive health policies in Blora Regency in efforts to prevent child marriage, namely that there is no specific policy on Reproductive Health for children and adolescents with reproductive health material substance that is in accordance with statutory regulations, there is no commitment between related agencies in implementing reproductive health policies for children and adolescents, the lack of adequate PKPR service facilities both at community health centers and schools, and the lack of competent human resources implementing reproductive health policies.

Keywords: Policy, Reproductive Health, Child Marriage.